



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
**BIRO HUKUM**

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Telepon 021-3822014,3822314  
Website: jdih.jakarta.go.id email: birohukum@jakarta.go.id  
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : e-0151/HK.03.04 24 Juli 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar Kepada  
Hal : Undangan Rapat Yth. (Daftar Undangan terlampir)  
Koordinasi JDIH

di  
Jakarta

Sehubungan dengan penilaian JDIH di lingkungan Pemerintah  
Provinsi DKI Jakarta, diharapkan kehadiran Saudara pada:

hari : Jumat  
tanggal : 25 Juli 2025  
waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
tempat : Ruang Rapat I Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
Gedung Grha Ali Sadikin Blok G Lt. 9, Jakarta Pusat  
acara : Rapat koordinasi Pembinaan JDIH oleh BPHN kaitan  
Indikator Penilaian Tahun 2025

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan kehadiran  
Saudara tepat pada waktunya.

Atas kehadiran dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum Setda  
Provinsi DKI Jakarta,



Sigit Pratama Yudha  
NIP. 197612062002121009

Tembusan:  
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

## NOTULEN RAPAT

A. Waktu dan Tempat Hari/tgl : Jumat/25 Juli 2025 Jam : 09.00-selesai Tempat : Ruang Rapat I Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	B. Acara Rapat Koordinasi Pembinaan JDIH oleh BPHN kaitan Indikator Penilaian Tahun 2015
C. Peserta Rapat Tim JDIH Biro Hukum, Tim JDIH Wilayah, BPHN, Staff Peraturaan Perundang-Undangan I	D. Pimpinan Rapat - Kepala Subag Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
E. Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya penambahan aspek pengelolaan jdih menjadi 6 aspek dengan tambahan aspeknya yaitu pengembangan dan inovasi</li><li>2. Evaluasi API Integrasi untuk JDIH DPRD jakut dan jakpus dikarenakan statusnya sudah tidak aktif, prosesing ipn tidak sesuai jaringan dan kapasitas server sehingga dibuat limit.</li><li>3. 29 indikator penilaian JDIH organisasi, Teknis pengelolaan(Abstrak puu itu ada aturan yang dibuat ditahun ini lebih dari 15 halaman harus dibuatkan abstrak tidak termasuk lampiran akan mendapat point 5), pemanfaatan TIK, SDM , Sarana dan prasarana, Koleksi dokumen hukum (PUU terupdate 5 tahun terakhir. Monografi ini terkait buku hukum, rancangan, majalah, dan perpustakaan hukum juga masukk didalamnya. Artikel (kalau dikumpulkan akan menjadi monografi, tpi kalau perjudul masuk kedalam katagori artikel. Putusan pun tidak semua bisa dimasukan/diupload kedalam JDIH. Koleksi dokumen langka ini termasuk SK, selain Staatblaad,yang bernilai story usia 50 tahun-an.) pengembangan/inovasi jdih (sosialisasi/promosi membuat konten satu tahun sebanyak 12 konten, tidak di up ditanggal yg sama serta kontennya yang beragam namun sesuai dengan implementasi hukum).</li><li>4. Akan adanya perubahan perpres JDIH yang nantinya akan merubah juknis JDIH juga. Perpres sebelumnya lebih keanggotaan kalau yg baru bagaimana dokumen yang sudah ada di portal akan d'integrasi seingga dapat diliterasikan ke Masyarakat.</li></ol>
F. Kesimpulan/Saran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dilakukan perbaikan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada JDIH untuk menambah point penilaian.</li></ul>
G. Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat/melakukan perbaikan pada website JDIH agar menambah point pada penilaian JDIH selanjutnya</li></ul>

Jakarta, 25 Juli 2025

Mengetahui,

Kasubag Tata Usaha Biro

Notulis Rapat

TTD

TTD

Dwi Fitriyanti Agustina, SH.

Fenny Amala K